

Konsep Desain Bangunan Koreksional dan Pembinaan bagi Wanita (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang)

Noverna Christy Lovita, Triandriani M, Ali Soekirno

*Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang
Alamat Email penulis : novernachristy@gmail.com*

ABSTRAK

Bergesernya waktu kepada era modern menggeser pengertian penjara pada masa lalu menjadi pengertian yang baru. Tempat penghukuman itu saat ini lebih dikenal dengan sebutan lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan pengertian penjara dimasa lalu, pemasyarakatan mengandung arti menghukum dan membina warga binaan menjadi lebih baik. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah wanita sebagai pelaku tindak kejahatan yang pada akhirnya harus menghabiskan sebagian besar waktunya di balik jeruji meningkat. Wanita dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dari berbagai macam usia dan statusnya. Terkait dengan hal tersebut banyak ditemukan kasus wanita yang terpaksa menjalani masa kehamilan, melahirkan bahkan membesarkan anaknya dalam lapas. Bahkan ada yang harus menghabiskan masa tuanya di dalam lapas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sarana koreksional dan pembinaan yang dapat memwadahi aktivitas pembinaan sesuai dengan karakteristik wanita sebagai penggunanya. Karakteristik dan tahap pemasyarakatan menjadi dasar analisis dalam perumusan kriteria perancangan untuk mewujudkan konsep desain bangunan koreksional dan pembinaan yang sesuai bagi aktivitas pembinaan wanita.

Kata kunci: lapas, bangunan koreksional, lapas wanita

ABSTRACT

The changing of time to the modern era changes the old meaning of prison or jail to the new one. That punishment place better known as a correctional institutions. Correctional system has a very different meaning with a prison system in a past. Correctional system means how to change inmates by mental development and punishment until they can be a better person. Nowadays the number of women offenders that should be spent her time in jail is increased. In fact, there are many kind of women based on age difference or status in correctional institutions. Related to the fact there are a number of women that should be spent their pregnancy period, giving birth or raise their baby in that place, even their elderly time. That facts underlies to make a correctional facility based on woman's characteristic and also on correctional system. The correctional system and the woman's characteristic used as a basic of analysis to find the design criteria to make a design concept of correctional facility that accommodate the woman's correctional program activity.

Keywords: correctional institutions, correctional facility, woman's correctional institutions

1. Pendahuluan

Terjadinya peralihan sistem penjara kepada sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dalam Seminar Nasional dan Workshop LAPAS IDEAL 2011 dipaparkan oleh narasumber bahwa kondisi bangunan UPT Pemasyarakatan di Indonesia saat ini sebagian besar peninggalan Belanda dan sebagian besar dibangun pada masa orde baru sudah kurang tepat dengan adanya tuntutan dan perkembangan kebutuhan.

Kaum wanita yang sudah menerima putusan pengadilan, ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan yang sesuai yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Lembaga Pemasyarakatan Wanita bertujuan sebagai fasilitas koreksional yang dapat memisahkan narapidana wanita dari narapidana pria untuk menjaga keamanan dan menjaga pengaruh psikologis mereka sehingga pembinaan dapat terlaksana dengan baik

Di Kota Malang terdapat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A yang terletak di Kecamatan Sukun, Malang. Penghuninya pun berbagai kalangan, ada yang mengandung, membawa balita dan ada yang lansia. Sistem pembinaan sesuai dengan karakteristik wabin wanita yang ada perlu diwadahi dalam fasilitas yang sesuai.

Studi perancangan arsitektur pada objek Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang ini sendiri bertujuan mencari solusi dari permasalahan ruang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menyediakan bangunan lapas yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas warga binaan wanita sebagai penggunaanya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah konsep dasar standar perencanaan pembangunan gedung UPT. Lembaga Pemasyarakatan Wanita (khusus bagi wanita), karena selama ini belum ada konsep dasar standar perencanaan pembangunan gedung UPT. Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dijadikan acuan perencanaan. Maka dirumuskan permasalahan terkait dengan permasalahan yang ada, yaitu: bagaimana konsep desain bangunan koreksional dan pembinaan yang dapat mewadahi aktivitas dan karakteristik wabin khususnya warga binaan wanita dalam bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang ?

2. Bahan dan Metode

Untuk menyelesaikan rumusan masalah yang ada dibutuhkan landasan teori sebagai dasar analisis. Beberapa teori yang terkait dengan kajian, yaitu: tinjauan lembaga pemasyarakatan wanita kelas 2A, tinjauan bangunan koreksional, tinjauan warga binaan wanita.

2.1 Landasan teori

2.1.1 Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A

Dalam Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A adalah suatu organisasi atau badan hukum (dalam pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman) yang mewadahi kegiatan pembinaan bagi narapidana yang dikhususkan bagi wanita dewasa / wanita berusia diatas 18 tahun ke atas atau yang sudah menikah , baik pembinaan secara fisik maupun rohani agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat dengan daya tampung bangunan antara 250 – 500 orang.

Sesuai dengan jadwal kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang beberapa jenis kegiatan pembinaan yang ada, antara lain: pembinaan rohani (keagamaan dan konseling), pembinaan ketrampilan, pembinaan kesenian alat musik dan kegiatan pendidikan (kejar paket dan kunjungan perpustakaan).

2.1.2 Tinjauan Bangunan Koreksional

Dalam merancang bangunan koreksional harus disesuaikan dengan prinsip dasar perancangan yang tertera dalam Pokok – Pokok Pedoman Pemikiran Dalam Rancang Bangun, Bangunan UPT Pemasyarakatan (Ardoko, 2011) . Bangunan UPT Pemasyarakatan pada dasarnya termasuk dalam Kelompok Bangunan Khusus yang memiliki prinsip dasar perancangan bangunan,yaitu: keamanan, kekuatan, kesehatan dan keserasian. Selain harus sesuai dengan prinsip dasar perancangannya, bangunan lembaga pemasyarakatan yang baik sebaiknya memenuhi fungsinya sebagai sarana koreksional dan pembinaan. Bangunan yang memenuhi fungsi tersebut sedapatnya memenuhi elemen – elemen fungsi dasar dari sebuah sarana koreksional, yaitu: *housing, administration, correctional programs, inmate services, reception and discharge, medical services, food services, recreation, visiting, religion* dan *security control* (Chiara, 1973). Elemen fungsi dasar sarana koreksional tersebut dikelompokkan ruang dalam sarana koreksional berdasarkan standar internasional. Berdasarkan KepMen Kehakiman dan HAM RI No: M. 01.PL.01 01Th.2003 dan studi empiris kompleks bangunan pemasyarakatan dibagi menjadi kelompok fungsi: kantor, hunian, fasilitas utama serta fasilitas pendukung dan pengamanan. Pengelompokan ruang tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk analisis dalam menentukan kebutuhan ruang. Selain prinsip dan kelompok fungsi bangunan, perancangan bangunan koreksional harus sesuai dengan aspek desain. Beberapa aspek desain bangunan pemasyarakatan atau sarana koreksional menurut Chiara, 1973 adalah: latar belakang sejarah, pencitraan fisik, massa bangunan, ukuran, sirkulasi dan kontrol keamanan.

2.1.3 Tinjauan Warga Binaan Wanita

Tinjauan warga binaan wanita terkait dengan karakteristik warga binaan dan kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Thigpen,1998 membentuk klasifikasi warga binaan dengan metode menganalisa karakteristik warga binaan tersebut. Karakteristik yang digunakan, contohnya: jenis kelamin (pria/wanita/trans-seksual), usia, jenis kejahatan, dan status kesehatan. Sesuai dengan studi empiris, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang menggolongkan warga binaannya sesuai dengan usia, status marital dan jenis

kejahatannya. Kegiatan pembinaan pada LP. Wanita terbagi menjadi kegiatan pembinaan spiritual (pembinaan iman), *skill* (keterampilan) dan kesehatan.

2.2 *Metode Pengembangan Konsep*

Fokus kajian adalah pada konsep desain bangunan lembaga pemasyarakatan wanita berdasarkan gagasan perancangan utama yaitu peralihan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Objek kajian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang. Kajian terhadap Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 2A Malang, meliputi: kajian kondisi eksisting bangunan, kajian sistem pemasyarakatannya terkait dengan sistem pembinaan yang berlangsung dan kajian terhadap penggunaanya (wabin wanita).

Kajian pada awalnya dilakukan pada kondisi eksisting bangunan dan sistem pemasyarakatan pada LP. Wanita Kelas 2A Malang. Kajian ini merupakan bentuk evaluasi terhadap bangunan dan sistem pemasyarakatan LP. Wanita Kelas 2A Malang untuk menemukan permasalahan ruang melalui variabel aspek perancangan bangunan koreksional: citra fisik, massa bangunan, sirkulasi dan ukuran. Selain permasalahan ruang kajian terhadap sistem pemasyarakatan pada LP. Wanita digunakan untuk merumuskan sifat dan karakteristik tahapan pemasyarakatan dan wabin wanita. Dari hasil analisis diperoleh permasalahan ruang, karakteristik tahapan pemasyarakatan dan karakteristik wabin wanita yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kriteria desain. Terdapat dua kriteria desain yang dirumuskan, yaitu: kriteria desain tapak dan kriteria desain bangunan. Kriteria desain tapak dirumuskan berdasarkan kesimpulan analisis tapak pada kondisi eksisting bangunan LP. Wanita Kelas 2A Malang. Kriteria desain bangunan dirumuskan berdasarkan karakteristik tahapan dan wabin wanita yang dijabarkan sesuai variabel citra fisik, massa bangunan, sirkulasi dan ukuran. Kriteria desain bangunan selain dijabarkan sesuai keempat variabel aspek perancangan bangunan koreksional, dijabarkan juga sesuai prinsip dasar perancangan lapas, yaitu: keamanan, kekuatan, kesehatan dan keserasian. Seluruh analisis tersebut menggunakan metode kualitatif. Dalam proses menterjemahkan kriteria desain menjadi konsep desain dilakukan analisis kuantitatif yaitu pemrograman ruang. Program ruang ini menentukan kebutuhan ruang apa saja yang diwadahi dan besaran ruangnya. Setelah ditentukan besaran ruang, kriteria desain dikembangkan menjadi konsep desain, yaitu: konsep tapak, konsep citra fisik, konsep tata massa, konsep sirkulasi dan konsep ukuran yang divisualisasikan lewat sketsa konsep.

3. **Hasil dan Pembahasan**

3.1 *Konsep Tapak*

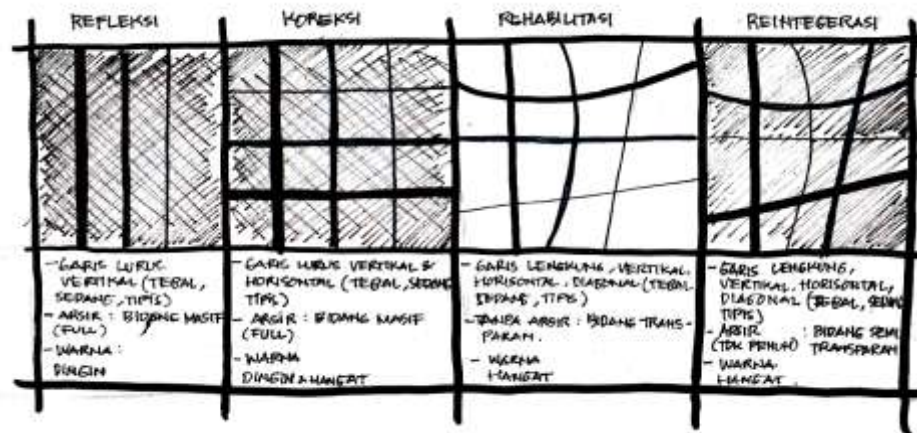
Konsep tapak dirumuskan berdasarkan kriteria tapak yang merupakan hasil analisis tapak pada analisis kondisi eksisting bangunan pada LP. Wanita Kelas 2A Malang. Konsep tapak meliputi:

1. Tapak terletak di bagian tepi Kota Malang, tidak dipusat keramaian dan akses terhadap instansi aparaturnya keamanan dan hukum dekat dan mudah diakses.
2. Ukuran tapak kurang lebih sesuai standar LP. Wanita Kelas 2A dengan bangunan bertingkat, kurang lebih 15.400 m².
3. Bentuk relatif teratur dan kontur relatif datar.
4. Tapak tidak terletak di daerah pemukiman padat penduduk.

3.2 Konsep Citra Fisik

Konsep Citra Fisik dirumuskan berdasarkan analisis tahapan pemasyarakatan dan analisis karakteristik pengguna. Hasil analisis tersebut berupa kriteria desain yang dikembangkan menjadi konsep sebagai berikut:

1. Citra fisik setiap kelompok fungsi bangunan disesuaikan dengan tahapan pemasyarakatan (refleksi, koreksi, rehabilitasi dan reintegrasi)
2. Citra fisik masing – masing tahapan dapat menterjemahkan sifat tahapan sesuai dengan sifat sistem pemasyarakatan atau sifat karakteristik wanita.
3. Citra fisik diwujudkan dalam unsur rupa : garis dan bidang, warna dan tekstur yang diwujudkan dalam elemen ruang (dinding, lantai, plafon/atap).



Gambar 1. Konsep Citra Fisik Bangunan Koreksional Pembinaan Bagi Wanita (sumber: hasil analisis, 2014)

Tabel 1. Konsep Penerapan Warna Pada Elemen Ruang

| KONSEP Warna Dingin | UNSUR | | |
|------------------------|----------------|---------------|--------|
| | Dinding | Plafond | Lantai |
| Warna | | | |
| Nada | sedang terang | sedang gelap | terang |
| Contoh warna | | | |
| KONSEP Warna Hangat | UNSUR | | |
| | Dinding | Plafond | Lantai |
| Warna | | | |
| Nada | sedang terang | sedang gelap | terang |
| Contoh warna | | | |

(sumber: hasil analisis, 2014)

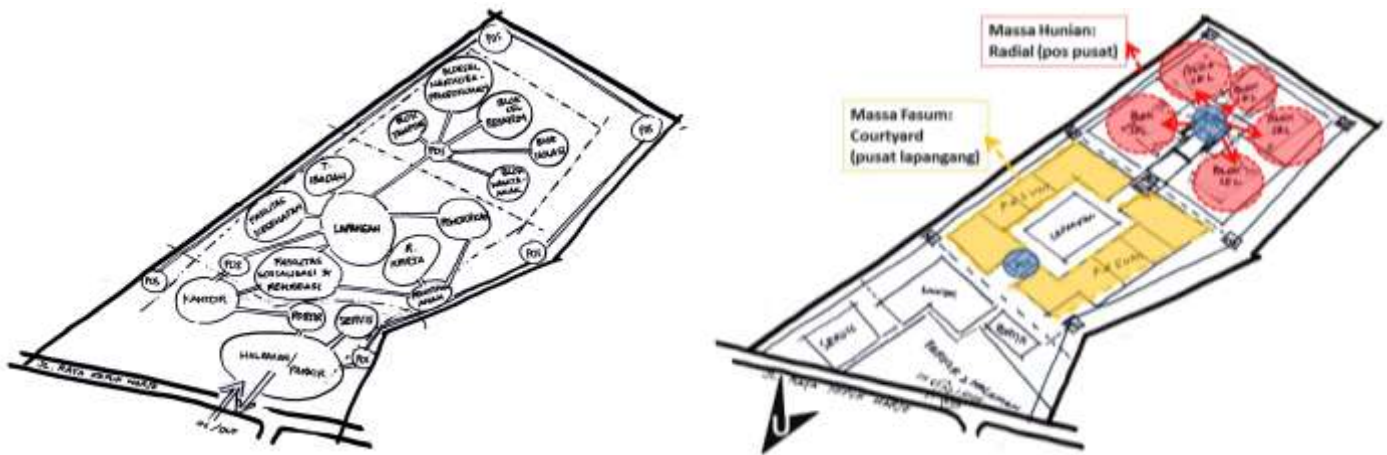
Konsep citra fisik bangunan koreksional dan pembinaan bagi wanita ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan bentukan massa, bentuk bukaan, jenis bidang dalam elemen bangunan dan warna yang akan dipakai dalam rancangan desain.

3.3 *Konsep Massa Bangunan*

Konsep massa bangunan dihasilkan dari kriteria massa bangunan yang merupakan hasil analisis tahapan pemasyarakatan, analisis karakteristik pengguna, analisis kelompok fungsi bangunan dan analisis tapak. Konsep massa bangunan terbagi dalam konsep zoning dan organisasi ruang. Konsep massa bangunan pada bangunan koreksional, sebagai berikut:

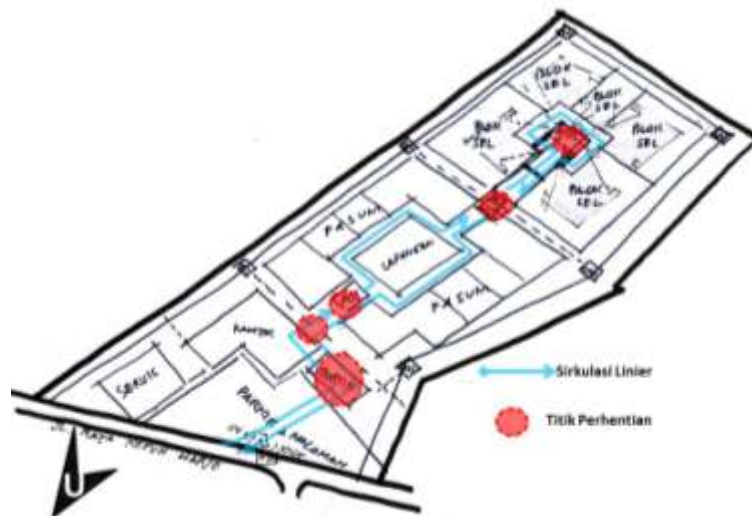
1. Konsep zoning berdasarkan:
 - a. Tingkat keamanan tapak (zona aman, zona cukup aman, zona tidak aman)
 - b. Kelompok tahapan pemasyarakatan (zona refleksi, zona koreksi, zona rehabilitasi dan zona reintegrasi)
 - c. Fungsi bangunan (fungsi pengelola, fungsi fasilitas umum dan fungsi hunian)
2. Zoning kelompok fungsi bangunan hunian dikelompokkan berdasarkan kelompok kejahatan dan klasifikasi yaitu:
 - a. Zoning Bloksel Narkoba - Pembunuhan
 - b. Zoning Bloksel Reskrim
 - c. Zoning Bloksel Tahanan dan pendamping
 - d. Zoning Bloksel Isolasi
 - e. Sel wanita hamil dan wanita dengan anak.
3. Konsep pola organisasi ruang pada masing – masing tahapan adalah:
 - a. Refleksi : Bebas
 - b. Koreksi : Radial
 - c. Rehabilitasi : Courtyard
 - d. Reintegrasi : Bebas
4. Organisasi sel lansia diletakkan di tiap bloksel pada lantai 1 sehingga aksesibilitasnya mudah.

Konsep massa bangunan pada tapak dikembangkan berdasarkan organisasi ruang dan zoning, dapat diterapkan lebih dari satu konsep (Gambar 2). Konsep fungsi bangunan hunian tata massa nya radial di termpatkan di zona aman (zona hunian) sedangkan untuk massa fasilitas umum tata massanya menggunakan pola courtyard dengan orientasi pada lapangan diletakkan di zona aman (zona fasilitas umum). Untuk tata massa kantor dan portir, karena tidak memiliki sifat khusus tata massanya menyesuaikan (bebas) diletakkan di zona paling tidak aman (zona pengelola). Massa penunjang terkait fungsi bangunan pengelola yaitu pos penjagaan di letakkan di titik sudut bagian luar tapak dan pos atas diletakkan di peralihan zona fasilitas umum ke hunian.



3.4 Konsep Sirkulasi

Berdasarkan kesimpulan pada hasil analisis sebelumnya, maka konsep sirkulasi, sebagai berikut:



Pada sirkulasi terbuka jalur sirkulasi tidak boleh tertutup pada dua sisi, salah satu sisi harus berbatasan dengan massa yang pandangnya bebas sehingga pengawasan pada tatanan massa lebih maksimal.

3.5 Konsep Ukuran

Konsep ukuran dalam bangunan sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan, adalah:

1. Ukuran sel sesuai dengan kapasitas ruang dan standar minimum besaran ruang sel (5,4m²/orang)
2. Ukuran sel ibu dan anak disesuaikan dengan kapasitas 2 orang dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pengasuhan anak.
3. Ukuran sel lansia disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan kegiatan lansia.
4. Ukuran ruang dalam setiap fungsi bangunan disesuaikan dengan masing – masing kegiatan yang diwadahi.

Dimensi pada gambar 4.38 ditentukan berdasarkan perhitungan besaran ruang yaitu kapasitas sel x standar ruang + 10% utilitas dan 25% sirkulasi. Terkait dengan kenyamanan bangunan, dimensi selain besaran luas terkait juga dengan volume ruang. Untuk fasilitas hunian, terkait dengan volume ruang, masing – masing sel ketinggian atap plafonnya berbeda. Untuk sel wanita tanpa anak ketinggian plafon 3,25 m. Sel wanita dengan anak dan lansia, tinggi plafon 3.5 m. Untuk fasilitas pembinaan minimal ketinggian plafond 3,5 m. Hal ini disesuaikan dengan analisis citra fisik bangunan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan konsep desain bangunan koreksional dan pembinaan bagi wanita yang mewadahi aktivitas dan sesuai dengan karakteristik penggunanya dapat dicapai dengan cara menemukan kriteria desain. Untuk menemukan kriteria desain tersebut, analisis yang perlu dilakukan adalah analisis:

1. Kondisi eksisting bangunan pada objek studi LP.Wanita Kelas 2A Malang.
2. Sistem pemasyarakatan.
3. Kegiatan dan Karakteristik Wabin Wanita sebagai pengguna.

Hasil analisis berupa kesimpulan permasalahan ruang dikembangkan menjadi kriteria desain. Kriteria desain ini dikembangkan berdasarkan variabel aspek dasar perancangan, yaitu citra fisik, massa bangunan, sirkulasi dan ukuran. Setelah menemukan kriteria desain dilakukan analisis kualitatif bersaran ruang dan pemrograman ruang. Kemudian kriteria dikembangkan menjadi konsep desain: Konsep Citra Fisik, Konsep Massa Bangunan, Konsep Sirkulasi, Konsep Ukuran dan Tapak.

Daftar Pustaka

- Ardoko, Purwo.Ir. 2011. *Pokok – Pokok Pedoman Pemikiran dalam Rancang Bangun Bangunan UPT. Pemasyarakatan. Preseden Seminar LAPAS IDEAL*. Surabaya: ITS
- Chiara, de Joseph and Michael J. Crosbie. 1973. *Time Saver Standards for Building Types*. New York. Mc.Graw-Hill.
- Thigpen, Morris,L.1998. *Jail Design Guide*. Kimme & Associates. U.S.
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
www.google.com-pdf/file